



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	4
1.4 Isu-isu Strategis	6
1.5 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	6
1.6 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	10
BAB II RENCANA KINERJA	12
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	12
2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan	17
2.3. Struktur Program Dan Kegiatan	18
2.4. Perjanjian Kinerja	24
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2. Realisasi Anggaran	40
3.3. Efisiensi Anggaran	43
3.4. Inovasi	46
3.5. Penghargaan	47
BAB IV PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Rekomendasi	49
Lampiran-lampiran	

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Dinas Sosial Kabupaten Kendal tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Kendal dan pihak terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Sosial Kabupaten Kendal yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kendal, Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL

MUNTOHA, S.KM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP.19760117 199412 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Fakir miskin dan anak terlantar menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhannya (UUD RI tahun 1945). Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Isu permasalahan sosial yang muncul adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin, dan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) yang semuanya harus dapat ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Dalam pelaksanaanya Dinas Sosial harus melakukan pelaporan sampai sejauhmana kinerja yang di capai oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

Sebagai pelaporan kinerja, maka Dinas Sosial Kabupaten Kendal setiap tahun, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan program kegiatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 untuk mengukur hasil kinerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 tahun kedepan, salah satunya yang menjadi harapan keberhasilan dapat membangun penerapan dari good governance bagi setiap instansi pemerintah dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Perangkat Daerah dengan menuangkan segala informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan instansi

pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah berfungsi diantaranya untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/ unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Tata kepemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Prinsip-prinsip good governance dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Kendal telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Kendal serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

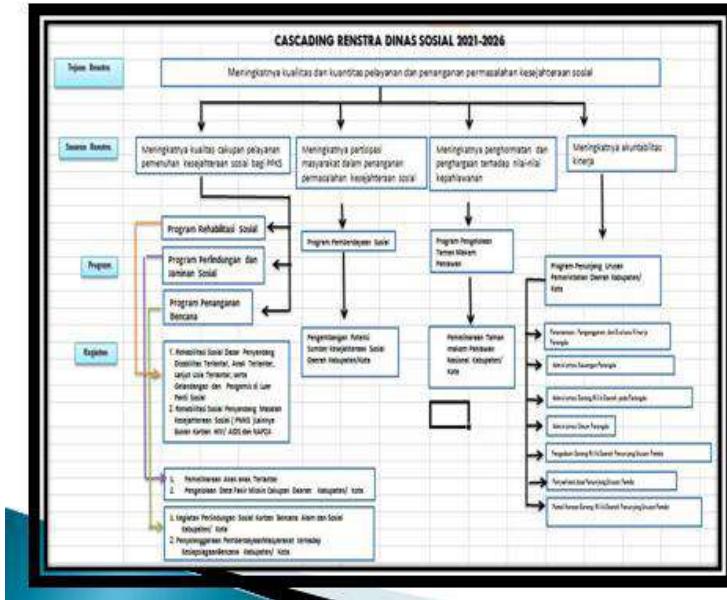
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.2 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

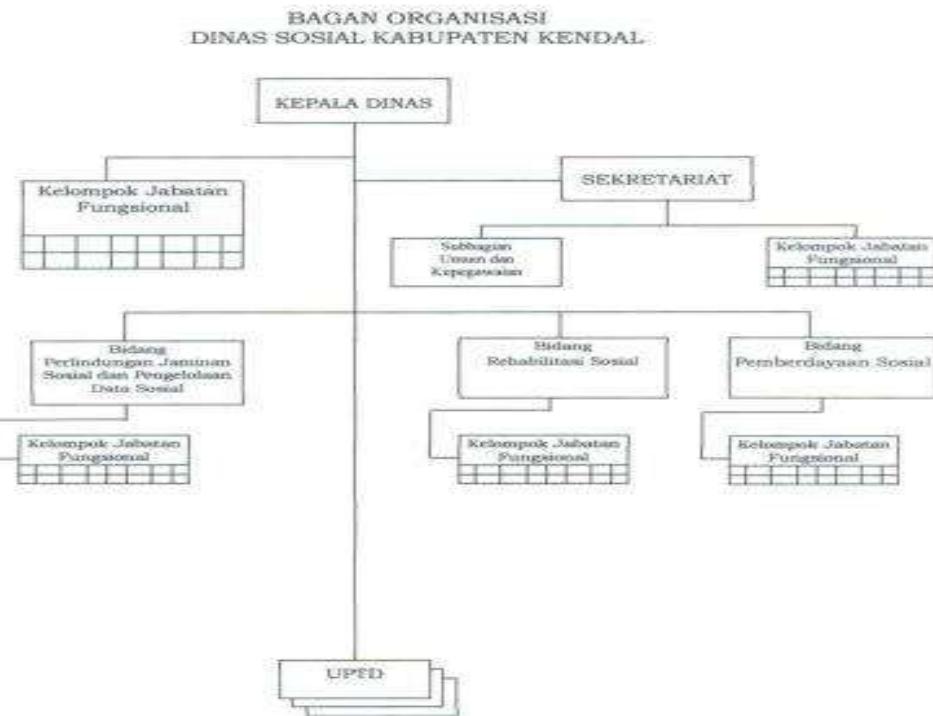
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kendal, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026.

Dinas Sosial Kabupaten Kendal dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1 : Cascading Kinerja



Gambar 2 : Struktur Organisasi



1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dinas Sosial Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2023, untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kendal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang sosial;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sosial;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang sosial.

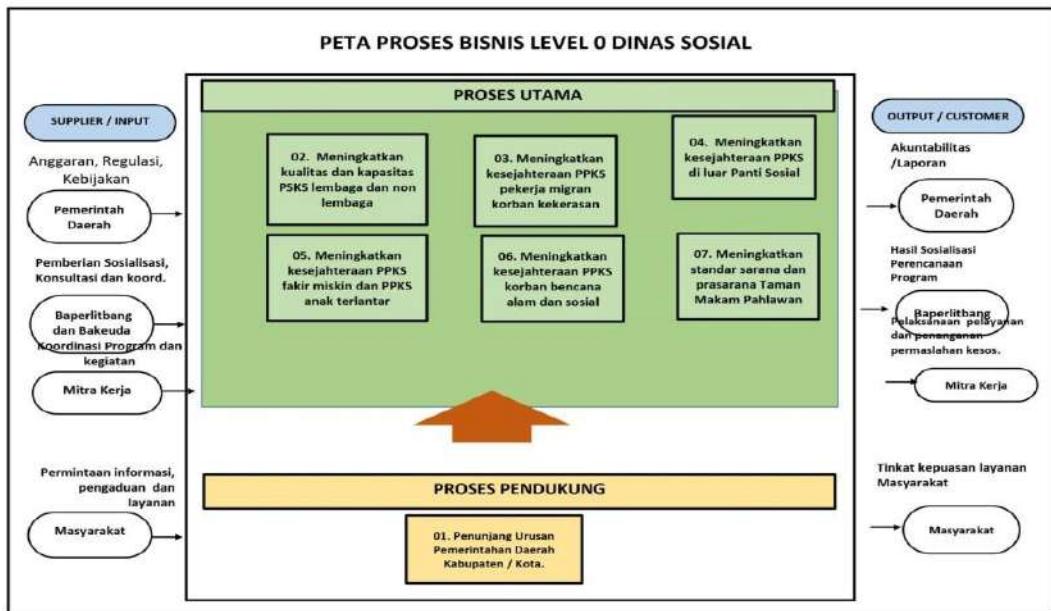
Pengaturan tata kerja dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam pelaksanaan tugas-tugas internal organisasi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Tata kerja juga menunjukkan garis komando yang merupakan gambaran hirarki yang ada di dalam organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah disusun peta proses bisnis Dinas Sosial Kabupaten Kendal, peta proses bisnis Dinas Sosial Kabupaten Kendal meliputi:

1. Proses utama yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemberdayaan sosial
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial
 - c. Penyelenggaraan rehabilitasi Sosial
2. Proses pendukung yang meliputi : Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Adapun gambaran peta proses bisnis level 0 Dinas Sosial Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut ini :

Gambar 3 : Peta proses bisnis level 0



1.4 Isu-isu Strategis

Adapun permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya perbaikan di data kesejahteraan sosial
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana layanan rehab kesos bagi PPKS
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana R.Singgah/selter yang memenuhi standar
4. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Belum optimalnya pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
6. Belum sesuainya keadaan gedung kantor dan sarana dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

1.5 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 :Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Jml	Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Kualifikasi					L	P	
1	2	3	4				5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA	SD	S2	S1	D3	D2	SMA	SLTP	SD	
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	1						1
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	4		4				4	1	3					2 2
	2. Pengawas	1		1				1	1	0					0 1
	3. Pelaksana	55		11	17	19	8	11	0	7	1	-	2	-	1 7 4
C.	Jabatan Fungsional	17		17				8	2	6	-	-	-	-	2 6
	Jumlah	78		33	17	19	8	25	5	16	1	0	2	0	1 12 13

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Sosial kab kendal Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial Kabupaten Kendal relatif sedang dan didominasi oleh perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 16 orang, disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 5 orang, D3 sebanyak 1 orang, SLTA 2 orang, dan SD sebanyak 1 orang. Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 53 orang.

Tabel 2 :Sarana Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	TANAH	34	2.768.560.000
	TANAH	3	2.768.560.000
2	PERALATAN DAN MESIN	1.131	4.733.101.255
	ALAT BESAR	3	4.660.000
	ALAT ANGKUTAN	68	2.096.663.875
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4	7.550.000
	ALAT PERTANIAN	2	32.222.400
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	606	8532.775.404.
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	267	819.736.440
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	31	49.046.000
	ALAT LABORATORIUM	1	700.000
	ALAT PERSENJATAAN	0	0
	KOMPUTER	149	868.747.136
	ALAT EKSPLORASI	0	0
	ALAT PENGEBORAN	0	0
	ALAT PRODUksi, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0
	ALAT PERAGA	0	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
	RAMBU – RAMBU	0	0
	PERALATAN OLAH RAGA	0	0
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	15	1.997.931.150
	BANGUNAN GEDUNG	13	1.579.169.715
	MONUMEN	0	0
	BANGUNAN MENARA	0	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2	418.761.435
4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	1	101.724.000
	JALAN DAN JEMBATAN	0	0
	BANGUNAN AIR	1	101.724.000
	INSTALASI	0	0
	JARINGAN	0	0
5	ASET TETAP LAINNYA	0	0
	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA	0	0
	HEWAN	0	0
	BIOTA PERAIRAN	0	0
	TANAMAN	0	0
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0
6	KOSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0	0
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0	0
7	ASET LAINYA	3	139.272.000
	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
	ASET TIDAK BERWUJUD	3	139.272.000
	ASET LAIN-LAIN	0	0
TOTAL		1.150	9.601.316.495

Sumber: Data Neraca Dinas Sosial Kab Kendal 31 Desember 2024

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024

Kendaraan operasional Dinas Sosial Kabupaten Kendal terdiri dari yakni 1c(satu) unit kendaraan dinas jabatan, 8 (delapan) unit kendaraan operasional, dan 61 (enam puluh satu) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet akan tetapi belum memenuhi syarat karena usia bangunan Dinas Sosial kabupaten Kendal yang sudah sangat tua. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 80 % dari komputer/laptop yang

ada diproduksi Tahun 2000 awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 90 % berbasis IT.

Tabel 3 : Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	1		BELANJA OPERASI	15.233.273.213	15.170.079.341	(63.193.872)
5	1	01	Belanja Pegawai	4.590.715.347	3.604.290.347	(986.425.000)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.427.757.866	11.350.988.994	923.231.128
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	214.800.000	214.800.000	0
5	2		BELANJA MODAL	2.119.527.200	119.636.000	(1.999.901.200)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.394.000	53.626.000	23.232.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.083.133.200	60.000.000	(2.023.133.200)
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.000.000	6.000.000	0
Jumlah			17.352.800.413	15.289.705.341	(2.063.095.072)	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kab Kendal Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal berasal dari APBD Kabupaten Kendal, DAU SG, DBHCHT. Terlihat pada tabel 3, untuk tahun 2024 Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kendal semula Rp. 17.352.800.413 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 15.289.705.341 atau berkurang Rp. 2.063.095.072 Perubahan anggaran Tahun 2024 merupakan cerminan dukungan Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran.

1.6 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dinas Sosial Kabupaten Kendal telah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil evaluasi tahun 2023, saran/ rekomendasi dan tindak lanjut akan kami sajikan sebagai berikut:

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut	KETERANGAN
1.	Meningkatkan kualitas dokumen laporan capaian kinerja dengan menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, tahun lalu dan beberapa terakhir	Dokumen Laporan Capian Kinerja telah disusun dengan menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, tahun lalu dan beberapa terakhir	Data dukung terlampir (Lampiran 1)
2.	Melaksanakan rapat pengendalian capaian kinerja secara periodik dengan memaparkan hasil kinerja oleh penanggung jawab, rapat rutin dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah dan mendokumentasikan rapat serta menyusun notulen rapat sehingga sesuai dengan tahapan terget yang telah ditetapkan sehingga hasil rapat pengendalian sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai target	Telah dilaksanakan rapat pengendalian (POK) secara periodik	Data dukung terlampir (Lampiran 2)
3	Pimpinan Perangkat Daerah secara periodik melaksanakan evaluasi kinerja internal dengan pendalaman yang memadai dan merumuskan kebijakan kebijakan guna tindak lanjut dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja	Pimpinan Perangkat Daerah telah melaksanakan evaluasi kinerja internal secara periodik	Data dukung terlampir (Lampiran 3)

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut	KETERANGAN
4	Kepala Perangkat Daerah secara periodik melaksanakan evaluasi kinerja internal dengan pendalaman yang memadai dan Kepala Perangkat Daerah terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan guna tindak lanjut dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja	Dinas sosial sudah melaksanakan Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala	Data dukung terlampir (Lampiran 4)
5	Menyusun tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan melaksanakan tahapan rencana aksi serta melaksanakan evaluasi penyempurnaan atas pelaksanaan rencana aksi tersebut	Dinas Sosial telah menyusun tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan melaksanakan tahapan rencana aksi serta melaksanakan evaluasi penyempurnaan atas pelaksanaan rencana aksi	Data dukung terlampir (Lampiran 5)
6	Merumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut di perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran/ rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sudah ditindak lanjuti oleh perangkat daerah	Dinas Sosial telah melaksanakan rapat evaluasi dan monitoring tindak lanjut	Data dukung terlampir (Lampiran 6)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kendal selama empat tahun (2021-2026) adalah sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu:

"KENDAL HANDAL"

Unggul, Makmur, Berkeadilan

1. KENDAL HANDAL: adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing serta berwawasan lingkungan.
2. UNGGUL: adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmanian dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0.
3. MAKMUR: adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan menumbuhkan, memfasilitasi dan melindungi pelaku-pelaku ekonomi, industri kreatif (start up), UMKM, Industri Rumah Tangga berbasis potensi lokal
4. BERKEADILAN: adalah suatu kondisi terwujudnya pembangunan yang merata (berbasis wilayah), berimbang dan proporsional bagi seluruh warga masyarakat Kendal dengan ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatoris.

Untuk mencapai visi "KENDAL HANDAL: Unggul, Makmur dan Berkeadilan", terdapat 5 misi besar yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis inklusif ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman , tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan data dukung dan kelestarian lingkungan
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka sesuai dengan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal mengacu pada Misi 1 yaitu : Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).

Sedangkan Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah program unggulan” meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial”

Sedangkan keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal 2021 – 2026 adalah :

Misi 1 : Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan

menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).

Adapun dalam rangka implementasi visi misi Bupati Kendal tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Kendal menetapkan tujuan pembangunan bidang Sosial 5 (lima) tahun ke depan adalah meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021- 2026, Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026 sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih adalah :

Tujuan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

Sasaran

1. Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai- nilai kepahlawanan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Untuk dapat melihat lebih rinci mengenai target dimasing-masing tujuan, sasaran dengan indikator sasaran setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan per masalah kesejahteraan sosial		Tingkat Kesejahteraan I		%	20,25	20,19	19,95	19,87	19,77	19,68	19,57
	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan ke sejahteraan sosial di Luar Panti	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti / Jumlah PPKS di Luar Panti keseluruhan X 100	%	65,92	65,92	67,62	69,32	71,02	72,72	72,72
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi / Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga keseluruhan X 100	%	26,53	26,53	33,33	40,14	46,94	53,74	53,74
	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia / Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar X 100	%	7	75	80	85	90	95	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Hasil penilaian SAKIP	Skor	71,95	71,95	73,06	74,14	76,39	77,50	80

2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021 – 2026

Visi RPJMD: Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan			
Misi RPJMD yang terkait: MISI – 1 Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS melalui pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan, penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permensos No. 9 Tahun 2018, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rahabilitasi Sosial.	Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada Peningkatan peran PSKS dalam penanganan PPKS, peningkatan pencapaian SPM bidang Sosial
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3,	
	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui perbaikan taman makam pahlawan sesuai standar	

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kinerja administratif dan penunjang kinerja pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM, pemenuhan asset dan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran	Peningkatan kinerja administratif dan penunjang kinerja pelayanan difokuskan pada peningkatan kualitas kinerja dinas sosial dalam rangka akuntabilitas
--	------------------------------------	--	--

2.3. Struktur Program Dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Kendal melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan, Program kegiatan dan sub kegiatan semuanya untuk mendukung penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kendal. Program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raelisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan
- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

- 2.1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota

3. Program Rehabilitasi Sosial

- 3.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Sub Kegiatan
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial
 - c. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas
- 3.2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA
 - Sub Kegiatan
 - a. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - b. Pemberian Layanan Rujukan

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 4.1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

5. Program Penanganan Bencana

- 5.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan
 - a. Penyediaan Makanan

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- 6.1. Kegiatan Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penetapan (Rp)	Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
Meningkatnya akuntabilitas kinerja.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.727.242.7671	5.880.432.771	2.846.810.000
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270.180.000	270.180.000	0
	Sub Kegiatan			
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.030.000	10.030.000	0
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raelisasi Kinerja SKPD	10.150.000	10.150.000	0
c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	0
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.590.715.347	3.602.715.347	(988.000.000)
	Sub Kegiatan			
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.590.715.347	3.602.715.347	(988.000.000)
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	89.000.000	89.000.000
	Sub Kegiatan			
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	0	89.000.000	89.000.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	916.230.424	970.514.424	54.284.000
	Sub Kegiatan			

	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	0
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	0
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	23.500.000	3.500.000
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.218.000	19.092.000	874.000
	e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	0
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	783.012.424	832.922.424	49.910.000
	g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	15.000.000	0
	5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.444.000	31.444.000	0
	Sub Kegiatan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana			
	a. Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.444.000	31.444.000	0
	6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	519.197.800	523.297.800	4.100.000
	Sub Kegiatan			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.130.000	4.130.000	0
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.155.000	129.655.000	22.500.000
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.912.800	389.512.800	(18.400.000)
	7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.399.475.200	393.281.200	(2.006.194.000)
	Sub Kegiatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya			
	a. Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	20.000.000	0
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	60.626.000	(14.374.000)
	c. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	150.000.000	172.900.000	22.900.000
	d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	2.096.525.200	81.805.200	(2.014.720.000)
	e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	57.950.000	57.950.000	0
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	70.100.000	79.324.928	9.224.928
	1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	70.100.000	79.324.928	9.224.928
	Sub Kegiatan			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja			
	a. Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35.970.000	35.970.000	0
	b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20.290.000	20.290.000	0
	c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	13.840.000	23.064.928	9.224.928

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penetapan (Rp)	Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan sosial bagi PPKS kesejahteraan	Program Rehabilitasi Sosial	670.154.392	627.744.392	(42.41 0.000)
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	543.604.975	519.594.975	(24.010.000)
	Sub Kegiatan			
	a. Penyediaan Permakanan	250.000.000	250.000.000	0
	b. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial	139.139.975	139.139.975	0
	c. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	125.165.000	109.655.000	(15.510.000)
	d. Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	29.300.000	20.800.000	(8.500.000)
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA	126.549.417	108.149.417	(18.400.000)
	Sub Kegiatan			
	a. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	48.615.000	30.215.000	(18.400.000)
	b. Pemberian Layanan Rujukan	77.934.417	77.934.417	0
Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai – nilai kepahlawanan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	7.653.817.250	8.485.557.250	831.740.000
	Sub Kegiatan	7.653.817.250	8.485.557.250	831.740.000
	a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			
	b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	638.340.000	720.080.000	81.740.000
	Program Penanganan Bencana	205.066.000	190.226.000	(14.840.000)
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	205.066.000	190.226.000	(14.840.000)
	Sub Kegiatan			
	a. Penyediaan Makanan	205.066.000	190.226.0000	(14.840.000)
Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai – nilai kepahlawanan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	26.420.000	26.420.000	0
	Kegiatan Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	26.420.000	26.420.000	0
	Sub Kegiatan			
	a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	26.420.000	26.420.000	0
	J U M L A H	17.352.800.413	15.289.705.341	2.063.095.072

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada Tahun 2024 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kendal untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 **DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di luar panti	90,5 %
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial lembaga dan potensi sumber kesejahteraan sosial non lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	53,74 %
3.	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	77,50

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.410.042.804	Anggaran pendapatan dan belanja daerah / Dana alokasi umum
2.	Program Pemberdayaan Sosial	150.691.947	Anggaran pendapatan dan belanja daerah
3.	Program Rehabilitasi Sosial	366.268.792	Anggaran pendapatan dan belanja daerah /Dana alokasi umum spesifik grant
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	10.399.116.600	Anggaran pendapatan dan belanja daerah/ Dana bagi hasil cukai hasil tembakau
5.	Program Penanganan Bencana	255.112.000	Anggaran pendapatan dan belanja daerah
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	16.640.000	Anggaran pendapatan dan belanja daerah
	JUMLAH	17.597.872.143	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUNTOHA, S.KM. M.Kes
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos
Jabatan : BUPATI KENDAL

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di luar pant	71,02 %
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial lembaga dan potensi sumber kesejahteraan sosial non lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	46,94 %
3.	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	90 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	76,39

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.880.432.771	Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan / Dana alokasi umum perubahan
2.	Program Pemberdayaan Sosial	79.324.928	Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan / Dana insentif fiskal
3.	Program Rehabilitasi Sosial	627.744.392	Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan / Dana alokasi umum spesifik grant / Dana insentif fiskal
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.485.557.250	Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan / Dana bagi hasil cukai hasil tembakau

5.	Program Penanganan Bencana	190.226.000	Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	26.420.000	Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan
JUMLAH			15.289.705.341

Pihak Kedua,
DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos

Pihak Pertama,
KENDAL,
DINSOS
MUNTOHA, S.KM. M.Kes.
NIP. 19710416 199403 1 007

Pihak Kedua,
DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos

Pihak Pertama,
KENDAL,
DINSOS
MUNTOHA, S.KM. M.Kes.
NIP. 19710416 199403 1 007

Kendal, 18 Oktober 2024

Kendal, 18 Oktober 2024

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

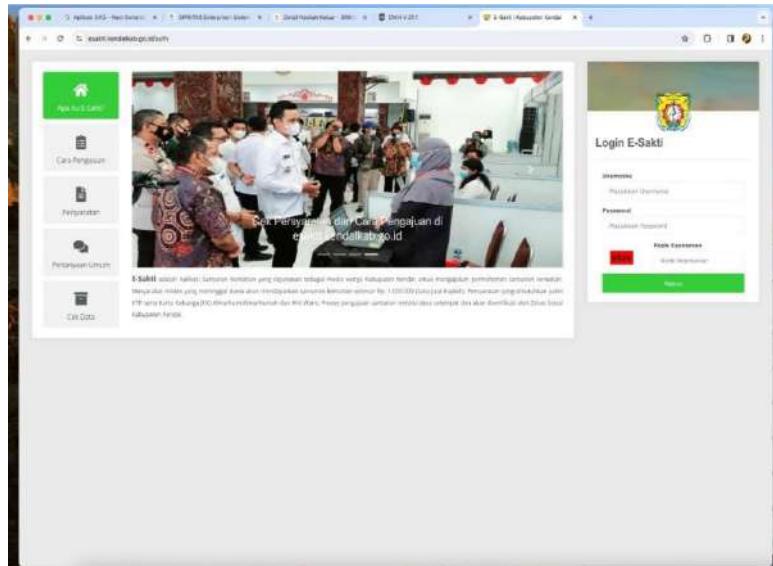
Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sosial Kab Kendal memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan dan mengembangkan aplikasi guna mendukung, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepegawaian dan pelayanan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten kendal, yaitu:

- a. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri
Adalah bangunan system aplikasi terintegrasi dari Kementerian Dalam Negeri atas *e-planning*, *e-budgetting* dan *e-penatausahaan keuangan* yang membantu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
- b. E SAKIP (Aplikasi SAKIP) dan Si EVA (Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)
Adalah bangunan system aplikasi terintegrasi dari Pemerintah Kabupaten Kendal terkait monitoring dan evaluasi kinerja yang membantu dalam evaluasi dan pengawasan pencapaian target-target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada tahun berjalan.

The screenshot shows the Si-EVA application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'SI-EVA' and a date/timestamp 'Hari ini: Kamis, 25 Januari 2024 Tahun anggaran: 2024'. Below this, a sidebar on the left lists various menu items under 'EVALUASI KINERJA': Indikator Daerah, RPJMD, RENSTRA, Tujuan Dan Sasaran, Realisasi Kinerja (which is selected and highlighted in blue), Evaluasi KIP, Laporan Evaluasi KIP, Analisis, and Data Master. The main content area is titled 'Realisasi Kinerja' and shows a sub-menu 'Home > Realisasi Kinerja'. A purple header bar contains the text 'Filter Data Realisasi!'. Below this, there are three tabs: 'Sasaran RKPD' (selected), 'Faktor Dan Tindak Lanjut', and 'Indikator'. A table below these tabs has columns for 'No.', 'Kode Sasaran', 'Uraian', and a small icon. A message 'Pilih Filter Terlebih Dahulu' is displayed above the table. At the bottom of the page, there is a footer with icons for user, lock, and file, and the text 'Si-EVA © 2024 Kabupaten Kendal' and the URL 'https://eiva.kendalab.go.id/app/tujuansasaran/kip'. The status bar at the bottom right shows the time '16:00'.

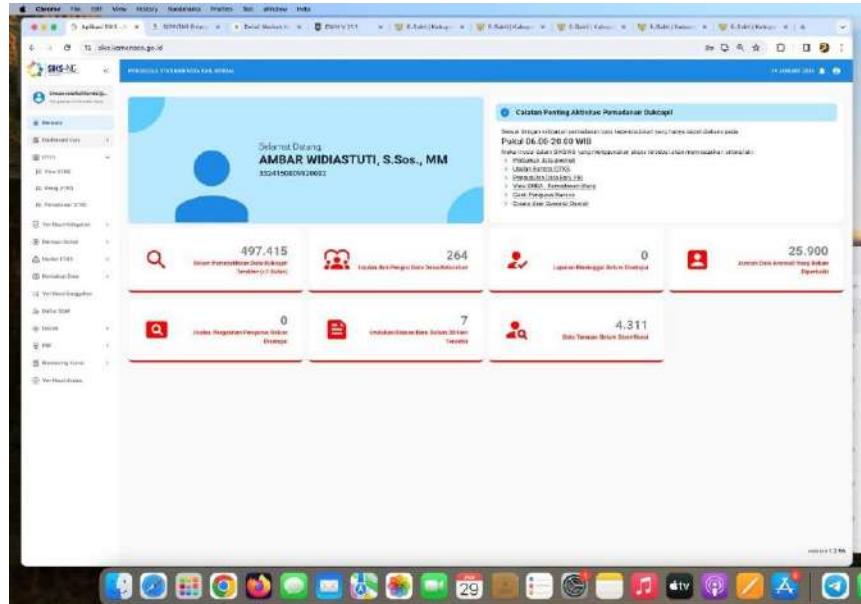
c. E SAKTI (Aplikasi Santunan Kematian Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)

Adalah bangunan system aplikasi terintegrasi dari Pemerintah Kabupaten Kendal terkait pengajuan santuna kematian bagi masyarakat Kabupaten Kendal yang masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial, setiap pengajuan akan mendapatkan uang santunan kematian Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)



d. SIKS -NG (Aplikasi Data Kesejahteraan Sosial)

Adalah aplikasi dari Kemensos untuk mengelola DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) berupa pendataan, pelaporan dan pengawasan data. Sehingga data Keesejahteraan sosial selalu bisa di laporkan dan di buka kapan saja.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Kendal telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal dengan Bapak Bupati Kabupaten Kendal tahun 2024.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pada tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Kendal telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2024. Capaian Dinas Sosial dapat di lihat dari tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	%	
Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	%	71,02	90,5	127	72,72
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	%	46,94	42,9	91,39	53,74
Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	90	90	100	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Skor	75,75	76	101	80

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

- Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS
- Indikator : Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di luar panti
- Target : 71,02 %
- Realisasi : 90,05 %
- Prosentase : 127 %

Analisis Capaian:

- Terpenuhinya capaian kinerja tahun 2024 melebihi target menunjukan bahwa PPKS yang menerima layanan di luar panti yang mencerminkan perluasan akses dan kualitas pelayanan sosial
- Pencapaian target pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS dikarenakan Dinas Sosial berkerjasama dengan berbagai pihak dalam penanganan PPKS
- Peningkatanb sarana dan prasarana serta SDM penanganan PPKS

Tabel capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Sasaran Strategis 1	Indikator Sasaran Strategis 1	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Sumber data
Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	71,02	90,5	127,4	Sangat Baik	Laporan kinerja RPJMD

Perbandingan capaian kinerja :

No	Sasaran Strategis 1	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		2024			
				2022	2023	Target	Realisasi Capaian	%	Status Capaian
1.	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti / Jumlah PPKS di Luar Panti keseluruhan x 100%	%	67,62	69,32	71,02	90,05	127	Sangat Baik

Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

Indikator : Prosentase PSKS lembaga dan non lembaga yang bersertifikat dan terakreditas

Target : 46,94

Realisasi : 42,9

Prosentase : 91,39

Analisis Capaian:

- Tercapainya target PSKS meskipun belum mencapai target sepenuhnya karena minimnya keikutsertaan SDM kesejahteraan sosial secara daring dalam proses sertifikasi PSKS yang diselenggarakan oleh LSPS (Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial)

Tabel capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

Sasaran Strategis 2	Indikator Sasaran Strategis	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Sumber data
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	46,94	42,9	91,39	Sangat Baik	Laporan kinerja RPJMD

Perbandingan capaian kinerja :

No	Sasaran Strategis 2	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		2024			
				2022	2023	Target	Realisasi Capaian	%	Status Capaian
1	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditai	Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi / Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga keseluruhan x 100%	%	33,33	77,08	46,94	42,9	91,39	Sangat Baik

Sasaran 3 : Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai keahlawanan

Indikator : Prosentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan

Target : 90

Realisasi : 90

Prosentase : 100

Analisis Capaian:

- Capaian kinerja telah berhasil direalisasikan secara penuh melalui pemenuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sehingga dalam pelaksanaan program terkait penghormatan nilai-nilai keahlawanan melalui pembangunan, termasuk kenyamanan pengunjung dan keluarga pahlawan telah terlayani sesuai dengan SOP yang ada.

Tabel capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 3

Sasaran Strategis 3	Indikator Sasaran Strategis	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Sumber data
Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai keahlawanan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	90	90	100%	Sangat Baik	Capaia kinerja dinas sosial

Perbandingan capaian kinerja :

No	Sasaran Strategis 3	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		2024			
				2022	2023	Target	Realisasi Capaian	%	Status Capaian
1	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia / Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar X 100	%	80	85	90	90	100%	Sangat Baik

Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator : Nilai SAKIP

Target : 75,75

Realisasi : 76,05

Prosentase : 100 %

Analisis Capaian:

- Pencapaian target SAKIP 100 % disebabkan karena perencanaan yang matang, pengukuran kinerja yang tepat, laporan kinerja yang akurat, evaluasi internal yang koperatif dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai. Disamping itu juga adanya faktor SDM yang kompeten dan berintegritas, kolaborasi dan koordinasi yang baik serta pemanfaatan TI.

Tabel capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 4

Sasaran Strategis 4	Indikator Sasaran Strategis	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Sumber data
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	75,75	76,05	100%	Sangat Baik	LHE SAKIP Dinsos

Perbandingan capaian kinerja :

No	Sasaran Strategis 4	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		2024			
				2022	2023	Target	Realisasi Capaian	%	Status Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	73,06	75,50	75,75	76,05	100	Sangat Baik

3.1.1. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun ini dengan target akhir dalam dokumen rencana strategis (renstra) dapat dilihat sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Target Akhir 2026
1	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	90,5	72,72
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	42,9	53,74
3	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai keahlawanan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	90	100
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	75,75 (2022)	80

3.1.2. Analisis Penyebab keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berikut disajikan tabel analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif/solusi upaya mengatasi kendala maupun permasalahan yang ada.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisa keberhasilan /kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Percentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	71,02	90,05	127	Pencapaian target pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS dikarenakan Dinas sosial berkerja sama dengan berbagai pihak dalam penanganan PPKS	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Percentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	46,94	42,9	91,39	Pencapaian target PSKS lembaga dan non lembaga yang bersertifikat meskipun target PSKS belum mencapai target sepenuhnya karena minimnya keikutsertaan SDM kesejahteraan sosial secara daring dalam proses sertifikasi PSKS yang diselenggarakan oleh LSPS (Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial)	Dinas Sosial akan mendorong dan menfasilitasi agar SDM kesejahteraan sosial aktif dalam pengurusan sertifikasi
3	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Percentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	90	90	100	Pencapaian terget pada pemenuhan standar sarana dan prasarana TMP di pengaruhi dengan kecilnya target yang ditentukan	Untuk masa yang akan datang target akan di naikan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	75,75	76,05 2023	100	Pencapaian pada nilai sakip di dorong karena komitmen semua pegawai Dinas Sosial Kab Kendal ingin memberikan yang terbaik untuk Kab Kendal	

3.1.3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut tabel analisis efisiensi yang membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran :

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	71,02	90,05	127	9.942.132.395	8.180.065.344	82	

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	46,94	42,9	91,39	1.534.289.928	1.513.725.011	99	
3	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	90	90	100	21.865.000	21.581.500	99	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	75,75	76,05 (2023)	102	4.970.714.115	4.573.384.711	92	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ada, secara keseluruhan persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanding dengan persentase realisasi anggaran sehingga efisiensi kinerja tercapai.

3.1.4. Analisis program/ kegiatan yang medukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran	Indikator	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	149,34	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100	Menunjang

No	Sasaran	Indikator	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Persentase PPKS di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100	Menunjang
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Prosentase PPKS lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	Menunjang
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100	Menunjang
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	100	Menunjang
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PPKS Fakir Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	Menunjang
				Program Penanganan Bencana	Prosentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	Menunjang

No	Sasaran	Indikator	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase SDM TARUNA SIAGA BENCANA dan kampung siaga bencana terlibat aktif dalam penanganan bencana	100	Menunjang
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Percentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	192,03	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan peran serta PSKS	100	Menunjang
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya PSKS Kabupaten Kendal	100	Menunjang
3	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Percentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100	Menunjang
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Percentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100	Menunjang

No	Sasaran	Indikator	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	102	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pengadaan Sarana Penunjang Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang

Berdasarkan tabel di atas Semua sasaran strategis sangat di dukung dan di tunjang oleh program kegiatan yang ada, sehingga dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi masyarakat terutama masyarakat fakir miskin dan Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terwujud dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.2.1. Tabel Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

(Posisi per 31 Desember 2024)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasasi (Rp)	Capaian Keu (%)	Capaian Fisik (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.880.432.771	5.173.729.538	88	100
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270.180.000	251.858.170	93	100
	Sub Kegiatan				
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.030.000	5.217.62	52	100
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raelisasi Kinerja SKPD	10.150.000	5.280.000	52	100
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	241.360.550	96	100
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.602.157.347	3.383.530.652	93	100
	Sub Kegiatan				
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.602.157.347	3.383.530.652	93	100
	3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.000.000	86.462.300	97	100
	Sub Kegiatan				
	a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	89.000.000	86.462.300	97	100
	4 Kegiatan Administrasi Umum PerangkatDaerah	970.514.424	591.823.170	60	100
	Sub Kegiatan				
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	4.532.000	91	100
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	26.520.000	100	100
	c. Penyediaan Peralatan RumahTangga	23.500.000	9.427.000	94	100
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.092.000	34.603.000	100	100
	e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	9.771.000	98	100
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	832.922.424	467.469.020	56	100
	g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	13907.500	92	100

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	Capaian Keu (%)	Capaian Fisik (%)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.444.000	31.316.000	60	100
	Sub Kegiatan				
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.444.000	31.316.000	99	100
	6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	523.297.800	506.530.890	96	100
	Sub Kegiatan				
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.130.000	3.350.000	81	100
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.655.000	115.339.712	88	100
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.512.800	387.841.178	99	100
	7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	393.281.200	322.208.356	81.92	100
	Sub Kegiatan				
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	8.265.400	41	100
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.626.000	40.252.300	66	100
	c. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	172.900.000	146.519.700	84	100
	d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	81.805.200	72.759.300	88	
	e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	57.950.000	54.411.656	99	100
	Program Pemberdayaan Sosial	79.324928	66.990.000	84	100
	1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	79.324928	66.990.000	84	100
	Sub Kegiatan				
	a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35.970.000	34.153.000	94,94	100
	b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20.290.000	10.511.000	51	100
	c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	23.064.928	22.326.000	96	100

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	Capaian Keu (%)	Capaian Fisik (%)
Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan sosial bagi PPKS kesejahteraan	Program Rehabilitasi Sosial	627.744.392	391.409.138	62	100
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	519.594.975	314.126.218	60	100
	Sub Kegiatan				
	a. Penyediaan Permakanan	250.000.000	117.320.000	46	100
	b. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial	139.139.975	109.598.718	78	100
	c. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	109.655.000	82.007.500	74	100
	d. Pemberian Layanan Kedaruratan	20.800.000	5.200.000	25	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA	108.149.417	77.282.920	71	100
	Sub Kegiatan				
	a. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	30.215.000	19.190.000	63	100
	b. Pemberian Layanan Rujukan	77.934.417	58.092.920	74	100
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.485.557.250	8.015.236.709	94	90
	1 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	8.485.557.250	8.015.236.709	94	90
	Sub Kegiatan				
	a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	720.080.000	641.257.709	89	100
	b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.765.477.250	7.373.979.000	94	100
	Program Penanganan Bencana	190.226.000	171.370.700	90	100
	1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	190.226.000	171.370.700	90	100
	Sub Kegiatan				
	a. Penyediaan Makanan	190.226.000	171.370.700	90	100
Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai – nilai keahlawanan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	26.420.000	26.242.500	99	100
	1 Kegiatan Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	26.420.000	26.242.500	99	100
	Sub Kegiatan				
	a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	26.420.000	26.242.500	99	100
	J U M L A H	15.289.705.341	13.844.978.585	91	99,98

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 penyerapan anggaran per Sub Kegiatan sangat bervariatif dan rata – rata capaian fisik 100 %.

3.3. Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan program kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 mengalami penghematan anggaran dikarenakan ada nya beberapa permasalahan pada pendapatan daerah. Dinas Sosial mengefisensi anggaran sebagai berikut:

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.880.432.771	5.173.729.538	706.703.300
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270.180.000	251.858.170	18.321.830
	Sub Kegiatan			
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.030.000	5.217.62	4.812.380
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raelisasi Kinerja SKPD	10.150.000	5.280.000	4.870.000
c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	241.360.550	8.639.450
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.602.157.347	3.383.530.652	219.184.695
	Sub Kegiatan			
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.602.157.347	3.383.530.652	219.184.695
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.000.000	86.462.300	2.537.700
	Sub Kegiatan			
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	89.000.000	86.462.300	2.537.700
4	Kegiatan Administrasi Umum PerangkatDaerah	970.514.424	591.823.170	378.691.257
	Sub Kegiatan			
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	4.532.000	188.300
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	26.520.000	8.173.000
c.	Penyediaan Peralatan RumahTangga	23.500.000	9.427.000	976.500
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.092.000	34.603.000	2.147.000
e.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	9.771.000	660.500
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	832.922.424	467.469.020	365.453.404
g.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	13907.500	1.092.500

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.444.000	31.316.000	128.000
	Sub Kegiatan			
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.444.000	31.316.000	128.000
	6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	523.297.800	506.530.890	16.766.910
	Sub Kegiatan			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.130.000	3.350.000	780.000
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.655.000	115.339.712	14.315.288
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.512.800	387.841.178	1.671.622
	7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	393.281.200	322.208.356	71.072.844
	Sub Kegiatan			
	a. Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	8.265.400	11.734.600
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.626.000	40.252.300	20.373.700
	c. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	172.900.000	146.519.700	26.380.300
	d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	81.805.200	72.759.300	9.045.900
	e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	57.950.000	54.411.656	3.538.344
	Program Pemberdayaan Sosial	79.324.928	66.990.000	12.334.928
	1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	79.324.928	66.990.000	12.334.928
	Sub Kegiatan			
	a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35.970.000	34.153.000	1.817.000
	b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20.290.000	10.511.000	9.779.000
	c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	23.064.928	22.326.000	738.928

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan sosial bagi PPKS kesejahteraan	Program Rehabilitasi Sosial	627.744.392	391.409.138	236.335.254
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	519.594.975	314.126.218	205.468.757
	Sub Kegiatan			
	a. Penyediaan Permakanan	250.000.000	117.320.000	132.680.000
	b. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial	139.139.975	109.598.718	29.541.257
	c. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	109.655.000	82.007.500	27.647.500
	d. Pemberian Layanan Kedaruratan	20.800.000	5.200.000	15.600.000
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA	108.149.417	77.282.920	30.866.497
	Sub Kegiatan			
	a. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	30.215.000	19.190.000	11.025.000
	b. Pemberian Layanan Rujukan	77.934.417	58.092.920	19.841.497
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.485.557.250	8.015.236.709	470.320.541
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	8.485.557.250	8.015.236.709	470.320.541
	Sub Kegiatan			
	a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	720.080.000	641.257.709	78.822.291
	b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.765.477.250	7.373.979.000	391.498.250
	Program Penanganan Bencana	190.226.000	171.370.700	18.855.300
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	190.226.000	171.370.700	18.855.300
	Sub Kegiatan			
	a. Penyediaan Makanan	190.226.000	171.370.700	18.855.300
Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai – nilai kepahlawanan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	26.420.000	26.242.500	177.500
	Kegiatan Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	26.420.000	26.242.500	177.500
	Sub Kegiatan			
	a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	26.420.000	26.242.500	177.500
	J U M L A H	15.289.705.341	13.844.978.585	1.444.726.756

Secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat efisiensi anggaran diilah dari sisi penyerapan anggaran belanja sebesar Rp. 13.844.978.585 dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp. 15.289.705.341. Sehingga Tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.444.726.756 atau 90.55%.

3.4. Inovasi

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan wajib dasar ,Dinas Sosial pada tahun 2024 melakukan inovasi pelayanan kepada penyandang disabilitas fisik. Pelayanan yang diberikan berupa terapi, Dinas Sosial mendapat bantuan peralatan dari Kementerian Sosial memalaui Sentra Kartini Temanggung dan di Kembangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

Untuk mendapatkan pelayanan ini masyarakat langsung datang ke Dinas Sosial Kabupaten Kendal dan langsung di layani oleh petugas.

Dengan inovasi ini diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan terapi secara geratis. Kedepan Dinas Sosial Kabupaten Kendal akan selalu berupaya merumuskan dan melakukan inovasi untuk pelayanan PPKS dengan melibatkan peranserta PSKS, sehingga PPKS di Kabupaten Kendal bisa dan mampu merubah hidup untuk lebih baik lagi.

3.5. Penghargaan

Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada tahun 2024 menerima penghargaan Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman dan PEKPPP, ada beberapa kriteria dalam penilaian pelayanan publik, dan Dinas Sosial bisa mencukupi semua aspek penilaian, aspek yang dinilai yaitu:

1. Kompetensi pelaksana
2. Sarpras
3. Standar pelayanan
4. Persepsi mal administrasi
5. SPM / IKM
6. Penanganan Pengaduan

PENGHARGAAN YANG DIRAIH DINAS SOSIAL SELAMA TAHUN 2024



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kendal pada tahun anggaran 2024 merupakan tahun ke empat dari rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kendal periode 2021-2026. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui penilaian kinerja sasaran dan program / kegiatan/ sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kendal tahun 2024 yaitu sebanyak 4 (empat) sasaran , 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 15.289.705.341 dan total realisasi Rp 14.008.178.585 atau sebesar 91,62 %.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal selama Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis ke 1 "Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial " pelayanan kepada PPKS dengan capaian di atas 149 % atau kategori Sangat Tinggi.
2. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis ke 2 "Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial" dengan capaian kapasitas PSKS di atas 192 % atau kategori Sangat Tinggi.
3. Rata-rata capaian sasaran strategis ke 3 "Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan" dengan capaian 100 % atau kategori Sangat Tinggi.
4. Rata-rata capaian sasaran ke 4 "Meningkatnya akuntabilitas kinerja" dengan capaian nilai SAKIP target 71,95 dan mampu mencapai 75,55 bisa melampaui target dengan kategori BB.

Keberhasilan yang dicapai menunjukkan pelaksanaan urusan bidang sosial dicapai melalui dukungan anggaran dan kerja sama, kerja keras serta partisipasi semua pihak dalam mendukung capaian indikator.

4.2. Rekomendasi

Terhadap dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial berikut kami sampaikan beberapa langkah perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kendal, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja secara periodik agar bisa ditentukan strategi dan kebijakan dari Pimpinan Perangkat Daerah dalam pencapaian target kinerja;
2. Mendorong dalam pengeloaan data PPKS dan PSKS lebih baik lagi agar dalam penanganan rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial lebih mudah dan tepat sasaran;
3. Melaksanakan pengawasan pemantauan atau pengukuran kinerja secara berjenjang dan periodik atas capaian kinerja sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan.
4. Sebagai perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Dinas Sosial membutuhkan tempat pelayanan yang representatif, karena gedung Dinas Sosial yang ada saat ini sudah sangat meperihatinkan;
5. Membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Kendal disusun, semoga dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang terukur, jelas, dan transparan sekaligus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah khususnya di bidang sosial guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Sekian dan terima kasih.

Kendal, Februari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL

MUNTOHA, S.KM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP.19710416 199403 1 007

Lampiran 1

Analisis capaian kinerja per sasaran strategis:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS

Indikator : Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di luar panti

Target : 71,02 %

Realisasi : 90,05 %

Prosentase : 127 %

Analisis Capaian:

- Terpenuhinya capaian kinerja tahun 2024 melebihi target menunjukan bahwa PPKS yang menerima layanan di luar panti yang mencerminkan perluasan akses dan kualitas pelayanan sosial
- Pencapaian target pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS dikarenakan Dinas Sosial berkerjasama dengan berbagai pihak dalam penanganan PPKS
- Peningkatanb sarana dan prasarana serta SDM penanganan PPKS

Tabel capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Sasaran Strategis 1	Indikator Sasaran Strategis 1	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Sumber data
Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	71,02	90,5	127,4	Sangat Baik	Laporan kinerja RPJMD

Perbandingan capaian kinerja :

No	Sasaran Strategis 1	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		2024			
				2022	2023	Target	Realisasi Capaian	%	Status Capaian
1.	Persentase PPKS yang mendapatkan	Jumlah PPKS yang mendapatkan	%	67,62	69,32	71,02	90,05	127	Sangat Baik

	pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti	pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti / Jumlah PPKS di Luar Panti keseluruhan x 100%									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

Indikator : Prosentase PSKS lembaga dan non lembaga yang bersertifikat dan terakreditas

Target : 46,94

Realisasi : 42,9

Prosentase : 91,39

Analisis Capaian:

- Tercapainya target PSKS meskipun belum mencapai target sepenuhnya karena minimnya keikutsertaan SDM kesejahteraan sosial secara daring dalam proses sertifikasi PSKS yang diselenggarakan oleh LSPS (Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial)

Tabel capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

Sasaran Strategis 2	Indikator Sasaran Strategis	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Sumber data
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	46,94	42,9	91,39	Sangat Baik	Laporan kinerja RPJMD

Perbandingan capaian kinerja :

No	Sasaran Strategis 2	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		2024			
				2022	2023	Target	Realisasi Capaian	%	Status Capaian
1	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditai	Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi / Jumlah PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga keseluruhan x 100%	%	33,33	77,08	46,94	42,9	91,39	Sangat Baik

Sasaran 3 : Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai keahlawanan

Indikator : Prosentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan

Target : 90

Realisasi : 90

Prosentase : 100

Analisis Capaian:

- Capaian kinerja telah berhasil direalisasikan secara penuh melalui pemenuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sehingga dalam pelaksanaan program terkait penghormatan nilai-nilai keahlawanan melalui pembangunan, termasuk kenyamanan pengunjung dan keluarga pahlawan telah terlayanani sesuai dengan SOP yang ada.

Tabel capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 3

Sasaran Strategis 3	Indikator Sasaran Strategis	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Sumber data
Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai keahlawanan	Persentase pemenuhn standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	90	90	100%	Sangat Baik	Capaia kinerja dinas sosial

Perbandingan capaian kinerja :

No	Sasaran Strategis 3	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		2024			
				2022	2023	Target	Realisasi Capaian	%	Status Capaian
1	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia / Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar X 100	%	80	85	90	90	100%	Sangat Baik

Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator : Nilai SAKIP

Target : 75,75

Realisasi : 76,05

Prosentase : 100 %

Analisis Capaian:

- Pencapaian target SAKIP 100 % disebabkan karena perencanaan yang matang, pengukuran kinerja yang tepat, laporan kinerja yang akurat, evaluasi internal yang koperatif dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai. Disamping itu juga adanya faktor SDM yang kompeten dan berintegritas, kolaborasi dan koordinasi yang baik serta pemanfaatan TI.

Tabel capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 4

Sasaran Strategis 4	Indikator Sasaran Strategis	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Sumber data
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	75,75	76,05	100%	Sangat Baik	LHE SAKIP Dinsos

Perbandingan capaian kinerja :

No	Sasaran Strategis 4	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		2024			
				2022	2023	Target	Realisasi Capaian	%	Status Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	73,06	75,50	75,75	76,05	100	Sangat Baik

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS SOSIAL

Jl. Tentara Pelajar No. -Kendal Telp./Fax. (0294) 381178
email : dinsos@kendalkab.go.id, Website : www.dinsos.kendalkab.go.id

Kendal, 14 Agustus 2024

Nomor : 400.9/383/DINSOS
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada:
Yth. 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
3. Sub Koordinator pada Dinas Sosial;
4. Bendahara Pengeluaran;
5. Pembantu Bendahara Pengeluaran.
6.
di-

TEMPAT

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Agustus 2024
Waktu : Jam 08.00 WIB
Tempat : Aula Dinas Sosial Kabupaten Kendal
Acara : Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) bulan Juli 2024.
Keterangan : Masing-masing bidang agar menyiapkan rencana kegiatan semester II Tahun 2024.

Demikian, atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik

Muntoha, S.KM, M.Kes
Pembina
NIP. 197104161994031007



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENYELENGGARAAN RAKOR

- a. Pelaksanaan Rakor :
Hari/tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
Waktu : 08.00 WIB
- b. Pimpinan Rakor : Kepala Dinas Sosial
- c. Peserta Rakor :
Sekretaris Dinas
Para Pejabat Struktural (PPTK)
Sub Koordinator
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran Pembantu

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN SEMESTER II

Gambaran pelaksanaan kegiatan Triwulan 2 (sampai dengan Bulan Juli), dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah Pagu Anggaran	: Rp. 15.338.080.413
Realisasi keuangan (s/d Bulan Juli)	: Rp. 3.907.852.099
Sisa anggaran	: Rp. 11.430.228.314
Capaian fisik	: 45,68 %

III. PERMASALAHAN/HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Masih ada pekerjaan LS yang belum berjalan, untuk solusinya diadakan percepatan pelaksanaan kegiatan

IV. PEMBAHASAN RAPAT

1. Kegiatan rutin tetap berjalan sesuai jadwal yang direncakan
2. Kegiatan yang mengajukan LS agar bisa segera dilaksanakan agar tidak menumpuk di tanggal terakhir pengajuan SP2D.
3. Dalam rapat juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan hal-hal penting lainnya yang mendukung pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan.

V. PENUTUP

Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juli 2024, sebesar 45,68%.

Demikian hasil Rakor Pengendalian Internal Dinas Sosial Kabupaten Kendal keadaan semester II Tahun 2024. Terima kasih.

Notulis

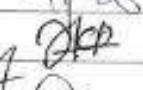
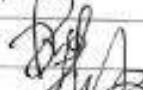
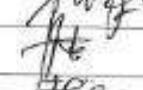
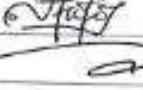
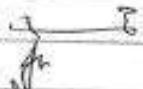
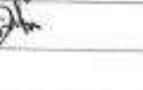
SUSIYANI, SE

DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024



DAFTAR HADIR

HARI : Kamis
 TANGGAL : 15 Agustus 2024
 TEMPAT : Aula Dinas Sosial Kab. Kendal
 ACARA : Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan Dinsos

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
	Sapiah	Secretaris	
	M. Heri Purnomo	Bid. Daya Masyarakat	
	Sukarni	Bid. Ressos	
	Nadifah Lubis	pengawas	
	OIN Biogami f	Staf	
	Fitri Firdaus	penguluhan sosial	
	A. Mahardika	An. Kebijaksanaan AM	
	Susiyani	pelaksana	
	Tryo Putraanto	"	
	Firwita Reni H.	penguluhan sosial	
	Gita Noviandyah	pelaksana	
	Dian Sutiboni	"	

Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS SOSIAL

Jl. Tentara Pelajar No : - Kendal Kode Pos 51316 Telp./Fax (0294) 381178
e-mail : website : www.dinsos.kendalkah.go.id

Kendal, 2 April 2024

Nomor : 400.9/101/DINSOS
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth,

1. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kendal
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
3. Bendahara Pengeluaran
4. Bendahara Pembantu Pengeluaran

di
TEMPAT

Mengharap dengan hormat kehadiran saudara/l pada:

Hari/tanggal : Rabu/ 03 April 2024
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Dinas Sosial Kabupaten Kendal
Acara : Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Keterangan : Membawa bahan laporan realisasi kegiatan sampai dengan bulan Maret 2024

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kendal

Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Muntoha, S.KM, M.Kes
Pembina
NIP. 197104161994031007



DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI EVALUASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

HARI/TANGGAL : RABU, 03 APRIL 2024

JAM : 09.00 WIB s.d SELESAI

TEMPAT : RUANG KEPALA DINAS SOSIAL KAB KENDAL

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sipis	Kelvin	1 ✓
2	Subarni	Bid - Resos	2 ✓
3	Ria Istianasni	Bid Cipinangsir	3 ✓
4	Sri Wahyuni	Fasbang Umum	4 ✓
5	Nadifah hakim	Staf	5 ✓
6	Mrs Sri	—	6 ✓
7	Prayogo	pelaksana	7 ✓
8	Siti Nurwiyudha	pelaksana	8 ✓
9	OLIN BUDIYANI	—	9 ✓
10	Sitiyanu	pelaksana	10 ✓
11			11
12			12
13			13

Kendal, 03 April 2024

SRI WAHYUNI, S.Kom, M.M
 NIP. 19810806 200801 2 006

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN
Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Tentara Pelajar Telp./Fax (0294) 381178 Kendal 51316
e-mail : dinsos@kendalkab.go.id, website : www.dinsos.kendalkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth	:	Bupati Kendal
Lewat Yth	:	Sekretaris Daerah
Dari	:	Kepala Dinas Sosial Kab. Kendal
Tembusan	:	Inspektor Daerah Kab. Kendal
Tanggal	:	22 April 2024
Perihal	:	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kab. Kendal Triwulan I Tahun 2024

Bersama ini dengan hormat kami laporan Hasil Rapat Koordinasi
Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024,
sebagai berikut :

A. Dasar

- 1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD.

B. Tujuan

- 1) Evaluasi terhadap capaian Dinas Sosial Tahun 2024 sebagai salah satu masukan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dan penyusunan rencana pembangunan Tahun 2026.
- 2) Mengevaluasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial s.d Triwulan I Tahun 2024 sesuai tujuan dan sasaran RPJMD.
- 3) Mengevaluasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta capaian keuangan Dinas Sosial berdasarkan dokumen Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2024.

C. Pelaksanaan

Hari / Tanggal	:	Rabu, 03 April 2024
Waktu	:	09.00 WIB - selesai
Tempat	:	Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial
Peserta	:	Sekretaris Dinas Sosial, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran

D. Hasil

- 1) Bawa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal maka perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024.
- 2) Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2024 merupakan tahapan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- 3) Capaian kinerja yang diukur meliputi :
 - a. Capaian kinerja IKU dan IKK Dinas Sosial Kab. Kendal
 - b. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - c. Capaian Keuangan Dinas Sosial Kab. Kendal, berdasarkan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024,

Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU dan IKK) Dinas Sosial Kab. Kendal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :

- a. IKU Dinas Sosial Kabupaten Kendal (Terlampir)

Berdasarkan analisis terhadap capaian IKU Dinas Sosial :

- Capaian sasaran persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di Luar Panti dengan persentase 71,02 % dikarenakan target yang disasaran sudah tepat.
- Capaian sasaran persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi dengan persentase 46,94 % dikarenakan dorongan dari Dinas Sosial yang mengharap agar PSKS mendapatkan sertifikat di sambut baik oleh PSKS Lembaga maupun non Lembaga untuk mendapatkan sertifikat.

- b. IKK Dinas Sosial Kabupaten Kendal (Terlampir)

Berdasarkan Analisis untuk capaian IKK Dinas Sosial diatas Capaian IKK bisa 100 % karena apa yang sudah di rencanakan dapat dilaksanakan secara maksimal dengan dukungan dari Pemerintah Daerah dan juga tenaga sosial baik Lembaga maupun non Lembaga.

- c. Capaian Keuangan Per Program

Berdasarkan Analisis capaian pada program Dinas Sosial, untuk capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di anggaran digunakan untuk kebutuhan rutin kantor dalam pelaksanaannya anggaran dapat terserap 16 % dengan capaian fisik 25 %, untuk program pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan anggaran terserap 0% dengan capaian fisik 10 %, pada program rehabilitasi sosial dalam pelaksanaannya anggaran terserap 1 % dengan capaian fisik 10 %, pada program perlindungan dan jaminan sosial dalam pelaksanaan anggaran terserap 2 %, dengan capaian fisik 10 %, serapan anggaran kurang maksimal karena harus ada beberapa perbaikan regulasi untuk penyaluran bansos PKH APBD dan BLT DBHCHT,

capaian program penanganan bencana dalam pelaksanaannya anggaran terserap 4 % dengan capaian fisik 15 %, capaian program pengelolaan taman makam pahlawan realisasi keuangan 0 % capaian fisik 5 %.

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Keu	% Fisik
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.712.522.771	1.011.152.660	16	25
2.	Program Pemberdayaan Sosial	70.100.000	0	0	10
3.	Program Rehabilitasi Sosial	670.154.392	4.010.000	1	10
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.653.817.250	36.165.000	2	10
5.	Program Penanganan Bencana	205.066.000	7.960.000	4	15
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	205.066.000	0	0	5

E. Saran dan Tindak Lanjut

- Kepala Dinas agar melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai target yang ditetapkan.
- Agar meminimalisir permasalahan dalam administrasi, teknis dan regulasi.
- Agar terus membangun sinergitas diantara bidang dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan mohon arahan.



Lampiran 4

Lampiran 5

5. Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja

No.	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	Sudah dilakukan perbandingan laporan tahun 2023 , 2024 dan untuk tahun selanjutnya
2.	Rapat Pengendalian capaian kinerja secara periodik	Dilakukan rapat POK
3.	Rapat Pembinaan Pegawai	Dilaksanakan rapat pembinaan SDM dan Pilar2 Sosial tiap 3 bulan sekali dan pembinaan pada apel pagi setiap hari senin



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023

PADA :
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KENDAL

LHE Nomor : 000.8.6.3/361/Insp
Tanggal : 23 Desember 2024

Lampiran 6



358Q+XJP, Tunggulrejo, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51315, Indonesia

Latitude
-6.93235126°

Longitude
110.18899592°

Local 07:09:08 AM
GMT 12:09:08 AM

Altitude 4 M
Senin, 26.08.2024





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS SOSIAL

Jl. Tentara Pelajar No : - Kendal Kode Pos 51316 Telp./Fax (0294) 381178
e-mail : website : www.dinosos.kendal.kab.go.id

Kendal, 6 Maret 2024

Nomor : 000.1/0294/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth.

1. Seluruh Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kendal
 2. CV Mitra Usaha
 3.
- di
TEMPAT

Mengharap dengan hormat kehadiran saudara/i pada:

Hari/tanggal : Kamis/ 7 Maret 2024
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Dinas Sosial
Acara : Rapat Pembinaan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kendal dan evaluasi tenaga outsourcing pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal
Keterangan : Wajib hadir tepat waktu

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya dsampaikan terimakasih.



DOKUMENTASI RAPAT PEMBINAAN PEGAWAI



NOTULA KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	Rapat pembinaan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kendal dan evaluasi Tenaga Outsourcing Pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal
Hari/Tanggal	:	Kamis, 7 Maret 2024
Waktu Rapat	:	07.30 WIB s/d 11.00
Tempat	:	Aula Dinas Sosial
Peserta Kegiatan	:	45 orang
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Sosial yang menyampaikan pembinaan. Beliau menyampaikan bahwa hidup adalah pilihan dan setiap pilihan harus dipertanggungjawabkan. Sama halnya menjadi Pegawai Negeri ataupun pegawai outsourcing maka harus disiplin baik dalam bekerja maupun dalam berpakaian.2. Petugas Pelayanan pada Sekretariat SLRT Dinas Sosial Kabupaten Kendal untuk dapat memaksimalkan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, meningkatkan efektivitas, melayani kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan secara akurat dan akuntabel.3. Pekerjaan kantor hendaknya dilakukan secara terencana dan dikerjakan bersama agar lebih efektif dan efisien.4. Sekretaris Dinas Sosial menambahkan agar para pegawai segera dalam melengkapi kecukupan cuti maupun SPPD agar pencairan TPP dapat segera dilaksanakan.5. Kegiatan berjalan lancar.

Notulis,


SITI FAIZAH, SST

NIP. 19890328 201903 2 008

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUNTOHA, S.KM. M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos

Jabatan : BUPATI KENDAL

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 18 Oktober 2024.



DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos



MUNTOHA, S.KM. M.Kes
NIP. 19710416 199403 1 007

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial di luar pant	71,02 %
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial lembaga dan potensi sumber kesejahteraan sosial non lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	46,94 %
3.	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	90 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	76,39

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.880.432.771	Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan / Dana alokasi umum perubahan
2.	Program Pemberdayaan Sosial	79.324.928	Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan / Dana Insentif fiskal
3.	Program Rehabilitasi Sosial	627.744.392	Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan /Dana alokasi umum spesifik grant / Dana Insentif fiskal
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.485.557.250	Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan/

		/Dana bagi hasil cukai hasil tembakau	
5.	Program Penanganan Bencana	190.226.000	Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	26.420.000	Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan
	JUMLAH	15.289.705.341	



MUNTOHA, S.KM. M.Kes
NIP. 19710416 199403 1 007

Kendal, 18 Oktober 2024.

2.Rencana Aksi

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						Program Penanganan Bencana	Prosentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	Pelaksanaan penanganan korban bencana dan cengkatan persosial masyarakat dalam penanganan bencana	205.066	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Pengelolaan data sosial												
Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan				90			100%	Pengelolaan pemeliharaan dan pemenuhan sarpras TMP	26.420	Kepala Dinas												
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100%	Pemeliharaan dan perawatan TMP	26.420	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial												



RKT

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapat-kan pelayanan pemenuhan ke sejahteraan so-sial di Luar Panti	72,72
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan permasalahan ke-sejahteraan sosial	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	53,74
3.	Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	95
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	77,50



CASCADING

